



# BUPATI TANAH LAUT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 194 TAHUN 2003

## TENTANG

### PENDIRIAN DAN OPERASIONALISASI SLTP NEGERI 5 JORONG, SMU NEGERI 1 KINTAP DAN SMU NEGERI 1 KURAU KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah didirikan SLTP Negeri 5 Jorong;

b. bahwa dalam rangka peningkatan perlakuan kesempatan belajar bagi kelulusan SLTP/MTs ke jenjang yang lebih tinggi akan dilakukan SMU Negeri 1 Kintap dan SMU Negeri 1 Kurau;

c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;

6.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Biasa;

7.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas dan Badan-Badan;

8.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas dan Badan-Badan;

9.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003;

# MEMUTUSKAN

menetapkan :

ERTAMA

: Mengoperasionalkan sekolah baru SLTP Negeri 5 Jorong, SMU Negeri 1 Kintap dan SMU Negeri 1 Kurau dengan nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

IDUA

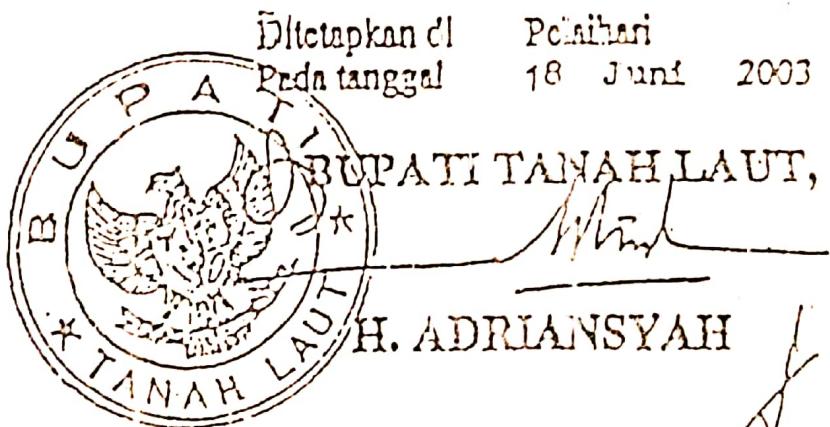
: Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini seperti diatum perama agar ditindaklanjuti dalam kelancaran pelaksanaan program perlusian dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ETIGA

: Biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut.

EMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 2003/2004.



nbusan :

Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel di Banjarmasin  
Kepala Sekolah ybs